

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya

Adelia Kasmawati, Nur Laila Yuliani\*

Program Studi Akuntansi /Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

\*email: [nurlailay@unimma.ac.id](mailto:nurlailay@unimma.ac.id)

---

### ABSTRACT

**Kata Kunci:**  
Kompetensi  
Aparatur Desa;  
Sistem  
Pengendalian  
Internal;  
Pemanfaatan  
Teknologi  
Informasi;  
Partisipasi  
Masyarakat;  
Implementasi  
Aplikasi  
Siskeudes;  
Akuntabilitas  
Pengelolaan  
Dana

*This study aims to examine the effect of village apparatus competence, Internal Control System, Utilization of Information Technology, Community Participation, and Implementation of the Siskeudes Application on Village Fund Management Accountability. This study uses a sample of village officials in Kandangan sub-district who manage village funds. By method purposive sampling The number of samples that can be processed in this study is 107 respondents. The method of data analysis in this study used multiple linear regression. The results of this study indicate that the Competence of the Village Apparatus and the Implementation of the Siskeudes Application have a positive effect on Village Fund Management Accountability. Meanwhile, the Internal Control System, Utilization of Information Technology and Community Participation have no effect on Village Fund Management Accountability.*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan Implementasi Aplikasi Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan sampel perangkat desa di kecamatan Kandangan yang mengelola dana desa. Berdasarkan metode *purposive sampling* Jumlah sampel yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah 107 responden. Metode analisis data penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Aplikasi Siskeudes berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Berdasarkan Temuan dari BPK *Semarang.bpk.go.id* (08/12/2018) bahwa masih menemukan adanya kelemahan terkait pengelolaan dana desa di Provinsi Jawa Tengah pada Laporan Hasil Pemeriksaannya. Permasalahan tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan desa dalam hal pengelolaan dana desa baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Dikutip dari *jatengprov.go.id* (12/04/2018) bahwa Kabupaten Temanggung sendiri untuk implementasi Siskeudes belum dijalankan seluruhnya oleh desa. Dari sejumlah 266 desa yang ada, baru 187 desa yang telah mengimplementasikan Siskeudes dalam laporan keuangannya, selebihnya sejumlah 79 desa masih menggunakan cara manual. Karena Perangkat Desa di Temanggung Belum Paham Aplikasi Siskeudes. Oleh Karena itu perangkat desa sangat rawan tersandung masalah keuangan. Untuk meminimalisir hal itu maka dengan diadakannya pelatihan Siskeudes yang diharapkan dalam perencanaan, pelaksanaan penganggaran, dan pelaporan keuangan desa akan menjadi lebih transparan dan efektif *MagelangEkspres.com*

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) meminta pemerintah mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari ICW, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Untuk kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa mencapai total RP 111 miliar (Kompas.com).

Besaran dana desa setiap desa itu berbeda, menurut *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014* tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan dengan 266 desa dan semuanya mendapatkan dana desa. Adapun rincian dana desa per kecamatan di Kabupaten Temanggung 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Rincian Dana Desa Kabupaten Temanggung  
Tahun 2020**

| No            | Kecamatan   | Dana Desa              | Persentase Dana Desa |
|---------------|-------------|------------------------|----------------------|
| 1             | Bulu        | 18.478.908.000         | 7,45%                |
| 2             | Ngadirejo   | 18.435.825.000         | 7,44%                |
| 3             | Kandangan   | 15.962.684.000         | 6,44%                |
| 4             | Kaloran     | 13.909.852.000         | 5,61%                |
| 5             | Kedu        | 13.619.946.000         | 5,49%                |
| 6             | Candiroto   | 13.245.954.000         | 5,34%                |
| 7             | Pringsurat  | 12.568.335.000         | 5,07%                |
| 8             | Wonobooyo   | 12.503.696.000         | 5,04%                |
| 9             | Parakan     | 12.475.775.000         | 5,03%                |
| 10            | Bejen       | 12.162.297.000         | 4,91%                |
| 11            | Kledung     | 12.034.455.000         | 4,85%                |
| 12            | Tembarak    | 11.701.870.000         | 4,72%                |
| 13            | Bansari     | 11.680.219.000         | 4,71%                |
| 14            | Jumo        | 11.456.787.000         | 4,62%                |
| 15            | Selopampang | 10.684.982.000         | 4,31%                |
| 16            | Gemawang    | 10.638.652.000         | 4,29%                |
| 17            | Kranggan    | 10.582.076.000         | 4,27%                |
| 18            | Tretep      | 10.397.082.000         | 4,19%                |
| 19            | Tlogomulyo  | 10.395.792.000         | 4,19%                |
| 20            | Temanggung  | 4.946.638.000          | 2,00%                |
| <b>JUMLAH</b> |             | <b>247.881.825.000</b> | <b>100,00%</b>       |

Sumber. Peraturan Bupati Temanggung nomor 23 Tahun 2020

Kecamatan Kandangan merupakan Kecamatan yang terluas di Kabupaten Temanggung dengan luas wilayah 78,36 Km<sup>2</sup> yang terbagi dari 16 desa (Badan Pusat Statistik, 2020). Kecamatan Kandangan terdiri dari 16 desa. Adapun rincian jumlah dana desa setiap desa di Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Kandangan menerima Dana Desa cukup besar di Kabupaten Temanggung. Salah satu desa di Kecamatan Kandangan yaitu desa Kedungumpul merupakan salah satu dari 27 desa terbaik di Temanggung. Desa Kedungumpul merupakan desa mandiri di Kandangan. Selain itu Desa Tlogopucang merupakan Desa Tertinggal di Kecamatan Kandangan. Karena belum adanya pelatihan administrasi, untuk SDMnya masih sangat kurang, belum sesuai dengan pekerjaan yang ada dan kadang untuk pekerjaan tertumpu hanya pada seseorang saja (hanya dikerjakan oleh orang itu-itu saja). Perangkat desa di Tlogopucang kurang menyatu dan bertanggungjawab atas tupoksinya masing-masing.

**Tabel 2. Rincian Dana dan Realisasi**

| No            | Desa         | Anggaran              | Realisasi             | Selisih            |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1             | Tlogopucang  | 1.412.779.000         | 1.344.941.000         | 67.838.000         |
| 2             | Ngemplak     | 1.188.548.000         | 1.047.507.919         | 141.040.081        |
| 3             | Margolelo    | 1.142.252.000         | 1.111.996.704         | 30.255.296         |
| 4             | Blimbing     | 1.121.952.000         | 1.092.729.390         | 29.222.610         |
| 5             | Gesing       | 1.100.351.000         | 1.082.662.428         | 17.688.572         |
| 6             | Samiranan    | 1.066.458.000         | 926.334.177           | 140.123.823        |
| 7             | Kembang Sari | 976.596.000           | 976.596.000           | 0                  |
| 8             | Banjarsari   | 947.101.000           | 891.245.550           | 55.855.450         |
| 9             | Malebo       | 936.055.000           | 931.449.975           | 4.605.025          |
| 10            | Wadas        | 913.416.000           | 890.296.852           | 23.119.148         |
| 11            | Rowo         | 900.701.000           | 860.264.000           | 40.437.000         |
| 12            | Kandangan    | 897.299.000           | 803.236.600           | 94.062.400         |
| 13            | Kedawung     | 861.642.000           | 851.687.000           | 9.955.000          |
| 14            | Kedungumpul  | 854.788.000           | 851.040.000           | 3.748.000          |
| 15            | Baledu       | 832.171.000           | 830.540.900           | 1.630.100          |
| 16            | Caruban      | 810.575.000           | 776.165.000           | 34.410.000         |
| <b>JUMLAH</b> |              | <b>15.962.684.000</b> | <b>15.268.693.495</b> | <b>693.990.505</b> |

Sumber. Peraturan Bupati Temanggung nomor 23 Tahun 2020

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh implementasi aplikasi siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1) Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Havesi, 2005). Teori stewardship menjelaskan bahwa karakter individu harus memiliki tanggungjawab serta integritas yang tinggi. Kompetensi dapat diperoleh jika dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Terkait pengelolaan dana desa, maka seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa. Sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa,

dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Hasil penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), Masruhin dan Kaukab (2019), Dewi dan Gayatri (2019), Pahlawan et al (2020), dan Jamil dkk (2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang berkompeten tinggi dan bertanggungjawab dalam semua tugasnya maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

*H1. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*

## 2) Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah sejumlah prosedur dimana bertujuan untuk melindungi asset atau kekayaan yang dimiliki oleh sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, dapat menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, serta dapat memastikan semua ketentuan hukum beserta kebijakan manajemen yang telah dipatuhi dan dijalankan yang sebagai mestinya (Hery, 2014). Kaitannya dengan teori *stewardship*, sesuai dengan perannya yaitu rakyat sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *steward*. Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan faktor yang penting, karena dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa, sehingga berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut. Hasil penelitian Widyatama dan Diarespati (2017) dan Atiningsih dan Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

*H2. Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*

## 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008:135). Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, dimana dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparatur lebih terbantu dalam hal pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Jamil dkk (2020), Anggraeni & Yuliani (2019) dan Perdana (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik nantinya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan cara proses penyusunan dan pelaporan keuangan

pemerintah desa yang lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

*H3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*

#### 4) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah suatu prinsip dimana dalam setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan dapat secara langsung maupun tidak langsung Sujarweni (2015:29). Rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah *steward*. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat diperlukan guna mencegah adanya kesalahpahaman anggaran dana desa mengingat sering terjadi penyelewengan dana desa di berbagai daerah. Hasil penelitian Pahlawan et al (2020), Atiningsih dan Ningtyas (2019), Masruhin dan Kaukab (2019), Adnan (2019), Dewi dan Gayatri (2019) dan Perdana (2018), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi serta kontribusi dalam proses pengelolaan dana yang diperoleh. Dengan adanya partisipasi masyarakat akan mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

*H4. Partisipasi Masyarakat Berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*

#### 5) Implementasi Aplikasi Siskeudes

Penerapan Aplikasi Siskeudes memudahkan aparat desa dalam melakukan penyusunan berbagai dokumen penatausahaan keuangan dan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Arfiansyah (2020). *principals* yaitu pemerintah pusat dan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa dari pemerintah desa *steward*. Sistem keuangan yang baik dibutuhkan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan desa. Penggunaan sistem keuangan memberikan kemudahan dalam penatausahaan dan mencegah terjadinya potensi penyimpangan. Hasil penelitian Suartana (2020), Luthfiani dkk (2020) dan Arfiansyah (2020) menunjukkan bahwa implementasi aplikasi siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

*H5. Implementasi Aplikasi Siskeudes Berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*

## METODE

### Data Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh dengan menggunakan instrument kuisioner. Populasi dalam penelitian ini Desa se-Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 16 Desa di Kecamatan Kandangan yang mendapatkan Dana Desa. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Kuisioner diajukan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahamn, Kasi Kesejahteraan, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, dan Badan Permusyawaratan Desa

### Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinan  $R^2$ , uji F, dan uji T.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Sampel Penelitian

Sampel penelitian pada studi ini tersaji dalam Tabel 3.

**Tabel 3.** Sampel Penelitian

| Uraian   | Jumlah Kuisioner |
|--|------------------|
| Kuisioner Yang dikirim                           | 128              |
| Kuisioner yang kembali                           | 128              |
| Kuisioner yang rusak                             | (21)             |
| Jumlah kuisioner yang diolah                     | 107              |
| Tingkat pengembalian kuisioner                   | 100%             |
| Tingkat pengembalian kuisioner yang dapat diolah | 83,59%           |

Sumber: Data Primer yang diolah 2021

### 2) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang dilakukan tersaji pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Statistik Deskriptif

|                    | N   | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|------|----------------|
| KAD                | 107 | 3       | 5       | 4    | 0,490          |
| SPI                | 107 | 4       | 5       | 4    | 0,500          |
| PTI                | 107 | 4       | 5       | 4    | 0,499          |
| PM                 | 107 | 3       | 5       | 4    | 0,500          |
| IAS                | 107 | 3       | 5       | 4    | 0,506          |
| APDD               | 107 | 3       | 5       | 4    | 0,518          |
| Valid N (listwise) | 107 |         |         |      |                |

Sumber: Data Primer yang diolah 2021

Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa di seluruh Kantor Kepala Desa di Kecamatan Kandangan. Ada 16 Kantor Kepala Desa yang digunakan untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel sendiri menggunakan metode *purposive*



sampling. Kuisisioner ditujukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahamn, Kasi Kesejahteraan, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kuisisioner yang disebar sebanyak 128 dan kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 107 eksemplar.

### 3) Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa indikator-indikator dengan nilai uji validitas  $> 0,50$  adalah valid. Namun terdapat pernyataan yang tidak valid yaitu 3 pernyataan Kompetensi Aparatur Desa (KAD), 2 pernyataan Sitem Pengendalian Internal (SPI), dan 1 pertanyaan Partisipasi Masyarakat (PM) yang tidak valid karena memiliki Cross Loading  $< 0,50$  sehingga tidak dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

### 4) Uji Reliabilitas

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel | <i>Cronbach Alpha</i> | Keterangan |
|----------|-----------------------|------------|
| KAD      | 0,873                 | Reliabel   |
| SPI      | 0,849                 | Reliabel   |
| PTI      | 0,817                 | Reliabel   |
| PM       | 0,826                 | Reliabel   |
| IAS      | 0,918                 | Reliabel   |
| APDD     | 0,893                 | Reliabel   |

*Sumber: Data Primer yang diolah 2021*

Berdasarkan tabel 5 hasil dari pengujian reliabilitas dapat diketahui bahwa untuk semua variabel memiliki *Cronbach's Alpha Based On Standardized Items*  $> 0,70$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel atau instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

### 5) Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yang dilakukan tersaji pada Tabel 6.

**Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda**

| Keterangan | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T      | Sig.  |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| (Constant) | 1,774                       | 0,498      |                           | 3,562  | 0,001 |
| KAD        | 0,373                       | 0,150      | 0,318                     | 2,486  | 0,015 |
| SPI        | -0,106                      | 0,162      | -0,093                    | -0,656 | 0,514 |
| PTI        | 0,137                       | 0,136      | 0,126                     | 1,008  | 0,316 |
| PM         | -0,038                      | 0,134      | -0,036                    | -0,283 | 0,778 |
| IAS        | 0,265                       | 0,113      | 0,266                     | 2,341  | 0,021 |

*Sumber: Data Primer yang diolah 2021*

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 6 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:



$$APDD = 1,774 + 0,373KAD - 0,106SPI + 0,137PTI - 0,038PM + 0,265IAS + e$$

6) Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil uji pengujian nilai koefisien determinasi sebesar 0,224. Hal ini berarti bahwa variabel kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan implementasi aplikasi siskeudes mampu menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 22,4%, sedangkan sisanya 77,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini.

b. Uji F

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung = 7,063 > F tabel = 2,30 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Jumlah n = 107 dan k = 5 maka df 1 = 5 dan df 2 = 101 (n-k-1) serta didapat F tabel senilai 2,30. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti model yang digunakan dalam penelitian ini layak (*fit*).

c. Uji t

**Tabel 7. Uji t**

| Variabel | t hitung | t tabel | Sig   | Keterangan        |
|----------|----------|---------|-------|-------------------|
| KAD      | 2,486    | 1,659   | 0,015 | H1 diterima       |
| SPI      | -0,656   | 1,659   | 0,514 | H2 tidak diterima |
| PTI      | 1,008    | 1,659   | 0,316 | H3 tidak diterima |
| PM       | -0,283   | 1,659   | 0,778 | H4 tidak diterima |
| IAS      | 2,341    | 1,659   | 0,021 | H5 diterima       |

Sumber: Data Primer yang diolah 2021

**1) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

Berdasarkan uji t diketahui bahwa kompetensi aparatur desa memiliki t hitung 2,486 > t tabel 1,659 dengan p value = 0,015 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi aparatur Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga **H1 Diterima**. Hal ini disebabkan karena aparatur desa yang memiliki kemampuan dan mengerti dalam pembuatan siklus akuntansi maka aparatur desa akan mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan sarana yang telah diberikan untuk membuat laporan pengelolaan dana desa.

Hal ini sesuai dengan *Stewardship Theory* dimana rakyat itu sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *steward*. Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa karakter individu harus memiliki tanggungjawab serta integritas yang tinggi. Terkait dengan pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa.

Jika aparatur desa itu berkompeten maka dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), Masruhin dan Kaukab (2019), Dewi dan Gayatri (2019), Pahlawan et.al (2020) dan Jamil, dkk (2020) bahwa kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Widyatama dan Diarapati (2017), Setiana & Yuliani (2017), Perdana (2018) dan Luthfiani, dkk (2020) mengatakan bahwa kompetensi aparat pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 2) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uji t diketahui bahwa sistem pengendalian internal memiliki t hitung  $-0,656 < t \text{ tabel } 1,659$  dengan  $p \text{ value} = 0,514 > 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga **H2 Tidak Diterima**. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya sistem pengendalian internal dapat menyebabkan kurang optimalnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang sistem pengendalian internal setiap aparatur desa. Aparatur desa harus bisa melakukan penilaian terhadap setiap pekerjaan untuk selalu mengedepankan tanggungjawab dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Selain itu, belum optimalnya tanggungjawab para aparatur desa dimana ini dapat mempengaruhi pengendalian internal atas laporan keuangan keuangan dana desa.

Hal ini tidak sejalan dengan *Stewardship Theory*, dimana adanya suatu sistem pengendalian itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa, dimana ini akan berimplikasi ke akuntabilitas dan tansparansi pemerintah desa tersebut. Sebagai seorang *steward* pemerintah desa harus bisa mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian dimana ini akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Sistem pengendalian internal sendiri sangatlah diperlukan dalam mengelola dana desa karena ini diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), Masruhin dan Kaukab (2019), Dewi dan Gayatri (2019), Pahlawan, dkk (2020) dan Jamil, dkk (2020) bahwa kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian Widyatama dan Diarapati (2017), Perdana (2018), Nafsiah dan Diana (2020) dan

Luthfiani, dkk (2020) mengatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa.

### **3) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

Berdasarkan uji t diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki t hitung  $1,008 < t \text{ tabel } 1,659$  dengan  $p \text{ value} = 0,316 > 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga **H3 Tidak Diterima**. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya penggunaan komputer, dalam penggunaan komputer untuk membuat laporan keuangan untuk jaringan internet harus memadai. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi karena kurangnya perangkat komputer yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengolah dan melaporkan laporan keuangan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan salah satu faktor utama bagi aparatur desa dalam menjalankan pekerjaannya. Sehingga, jika dalam pemanfaatan teknologi informasi kurang optimal maka dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa.

Hal ini tidak sejalan dengan *Stewardship Theory* yang menjelaskan bahwa dalam memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparatur desa akan lebih terbantu dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa juga akan selalu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan cara transparansi kepada masyarakat dimana ini sebagai wujud tanggungjawab pemerintah. Adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi ini dapat juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data, adanya teknologi informasi ini dalam pengelolaan dana desa maka akan mempermudah aparatur desa dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamil et al. (2020) dan Perdana (2018) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pahlawan et al. (2020) dan Riyadi & Kurnadi (2020) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **4) Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.**

Berdasarkan uji t diketahui bahwa partisipasi masyarakat memiliki t hitung  $-0,283 < t \text{ tabel } 1,659$  dengan  $p \text{ value} = 0,778 > 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga **H4 Tidak Diterima**. Semakin tinggi partisipasi dari masyarakat maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal

tersebut terjadi karena dalam pengelolaan dana desa belum melibatkan masyarakat dengan sepenuhnya yaitu tentang membuat rencana anggaran dan pengawasan pada penganggaran dana desa. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan memudahkan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan di desa juga akan semakin baik pula. Selain itu, jika pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa kurang maka akan berdampak adanya tindakan penyimpangan di dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan *Stewardship Theory* rakyat itu *principal* sedangkan pemerintah desa adalah *steward*. Partisipasi masyarakat diperlukan guna mencegah adanya kesalahpahaman anggaran dana desa mengingat sering terjadi penyelewengan dana desa di berbagai daerah. Tanpa partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan pembangunan maka akan gagal. Ketika partisipasi masyarakat meningkatkan maka akuntabilitas akan meningkat.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian dari Pahlawan et al. (2020), Atiningsih dan Ningtyas (2019), Masruhin dan Kaukab (2019), Perdana (2018), Adnan (2019) dan Dewi dan Gayatri (2019) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian Nafsiah & Diana (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa dikarenakan masyarakat belum begitu paham mengenai alokasi dana desa, masyarakat hanya sekedar mengikuti apa yang di intruksikan tanpa mengetahui berapa besar dana desa yang diperoleh serta kegunaanya.

##### **5) Pengaruh Implementasi aplikasi Siskeudes terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

Berdasarkan uji t diketahui bahwa implementasi aplikasi siskeudes memiliki  $t$  hitung  $2,341 > t$  tabel  $1,659$  dengan  $p$  value  $= 0,021 < 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi aplikasi siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga **H1 Diterima**. Hal ini disebabkan karena aplikasi siskeudes memberikan kemudahan untuk aparatur desa dalam pengelolaan baik dari perencanaan hingga pelaporan. Semuanya terintegritas dalam aplikasi siskeudes dan dalam penggunaannya aplikasi siskeudes itu mudah dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh desa. Penggunaan aplikasi siskeudes juga terdapat pembaruan yang berkelanjutan serta adanya pendampingan desa dalam proses implementasi aplikasi siskeudes dapat berjalan dengan sangat baik. Penerapan aplikasi siskeudes sendiri hanya dapat diakses oleh operator siskeudes di masing-masing desa dan belum terintegritas dengan aparatur pengendalian ditingkat kecamatan dan kabupaten. Dengan pelaporan yang terintegritas dan terkoneksi jaringan yang memadai maka akan meminimalkan

tindak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel. Semakin baik pengoperasian dan penggunaan aplikasi siskeudes maka akan semakin pula akuntabel pengelolaan dana desa.

Hal ini sesuai dengan *Stewardship Theory* sistem keuangan yang baik dibutuhkan untuk memantau dan dapat menegndalikan pelaksanaan pemerintahan desa. Adanya sistem keuangan dalam penggunaan dapat memberikan kemudahan dalam penatausahaan dan dapat mencegah terjadinya potensi penyimpangan. Sistem keuangan yang baik akan memudahkan penggunaan dan kebermanfaatannya akan berdampak pada semakin tingginya pencapaiannya pada akuntabilitas dimana ini tercermin pada aspek kejujuran, ketaatan perundang-undangan, semakin baik dalam menggunakan sistem keuangannya maka akan semakin baik pula dalam pencapaian akuntabilitasnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiani et al. (2020), Suartana (2020) dan Arfiansyah (2020) mengatakan bahwa aplikasi siskeudes berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan implementasi aplikasi sikeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel yang diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan data yang diperoleh 107 kuisisioner yang dapat diolah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan Implementasi Aplikasi Siskeudes berpengaruh positif. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang sistem pengendalian internal setiap aparatur desa. Aparatur desa harus bisa melakukan penilaian terhadap setiap pekerjaan untuk selalu mengedepankan tanggungjawab dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Selain itu, belum optimalnya tanggungjawab para aparatur desa dimana ini dapat mempengaruhi pengendalian internal atas laporan keuangan keuangan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena kurangnya perangkat komputer yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengolah dan melaporkan laporan keuangan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan salah satu faktor utama bagi aparatur desa dalam menjalankan pekerjaannya. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena semakin tinggi partisipasi dari masyarakat maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut

terjadi karena dalam pengelolaan dana desa belum melibatkan masyarakat dengan sepenuhnya yaitu tentang membuat rencana anggaran dan pengawasan pada penganggaran dana desa.

### **KETERBATASAN PENELITIAN**

1. Berdasarkan hasil *Adjust R Square*, bahwa variabel yang digunakan menjelaskan Akuntabilitas Dana Desa sebesar 22,4% sehingga masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Penelitian ini dilakukan pada saat masa pandemik covid-19, sehingga peneliti terbatas untuk bertemu dengan responden guna memberikan kuisisioner penelitian secara langsung.

### **SARAN**

1. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dimana dapat mempengaruhi akuntabilitas dana desa seperti peran perangkat desa karena terdapat hubungan antara karakteristik pegawai dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang memiliki pengaruh langsung pada masyarakat. Peran dari perangkat desa diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumberdaya yang dimiliki secara tepat dan mudahperan perangkat desa (Yesinia et al., 2018)
2. Penelitian selanjutnya selain menggunakan metode kuisisioner perlu juga menggunakan media seperti kuisisioner secara online dengan menggunakan google form. Dimana ini akan menghemat waktu dalam metoda penyebarannya. Dalam pengolahan data menggunakan kuisisioner online dapat memudahkan dalam mengolah data-data hasil jawaban responden. Jawaban dari responden akan direkap secara otomatis. Dimana ini akan sangat membantu dan dapat memudahkan untuk membandingkan data-data.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). The Effect Of Hunan Resource Competency. *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy*, 15–30.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Data Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut*



- Kecamatan di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, 2007-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2016/12/16/34/tingkat-pengangguran-terbuka-2007-2017.html>
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Havesi, G. A. (2005). *Standards for internal Control in New York Sate Government*. [www.osc.state.ny.us](http://www.osc.state.ny.us).
- Hery. (2014). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Kencana.
- Jamil, N. A., Rusli, A., & Muhani, P. M. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ) Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekon. *Ekonomi Dan Bisnis*, 12.
- Jatengprov.go.id. (2018). *Tahun 2018 Wajib Implementasi Siskeudes Secara Penuh*. Jatengprov.Go.Id. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/2018-wajib-implementasi-siskeudes-secara-penuh/>
- Kalan BPK Provinsi Jateng: Ada Keleham dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa*. (2018). Semarang.Bpk.Go.Id. [https://semarang.bpk.go.id/?page\\_id=9051](https://semarang.bpk.go.id/?page_id=9051)
- Kompas.com. (2021). *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat*. Kompas.Com. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- MagelangEkspres.com. (2019). *Mayoritas Perangkat Desa di Temanggung Belum Paham Aplikasi Siskeudes*. MagelangEkspres.Com. <https://magalangekspres.com/2019/12/14/mayoritas-perangkat-desa-di-temanggung-belum-paham-apilkasi-siskeudes/>
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(2), 104–112.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162.
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung tahun 2020*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa*.



- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.*
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Influence of Information Technology Utilization , Budgeting Participation and Supervi. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(2), 160–168.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap. *University Reseach Colloquim*, 205–210.
- Suartana, P. A. R. A. dan I. W. (2020). *Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Impementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 2839–2851.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Umaira, S. dan Adnan (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. 4(3).
- Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Warsita, B. (2008). *Teknologi pembelajaran: Landasan dan Aplikasinya*. Rineka.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>